

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan Indonesia berhasil diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Soekarno dan Hatta. Untuk mewujudkan suatu Pemerintahan yang berdaulat maka disusunlah keputusan-keputusan dan kelembagaan yang dapat menjalankan roda Pemerintahan. Sebagaimana yang disebut Sudharmono¹ Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 menetapkan keputusan membentuk :

1. Komite Nasional;
2. Partai Nasional Indonesia; dan
3. Badan Keamanan Rakyat.”

Sebelumnya, sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 telah mengambil keputusan dengan membagi wilayah administratif Republik Indonesia menjadi 8 (delapan) propinsi yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk Pulau Sumatera yang ditetapkan menjadi satu propinsi yakni propinsi Sumatera dengan Gubernurnya ditetapkan Mr. Teuku Moehammad Hassan. Menurut Sinar² Mr. Teuku Muhammad Hasan mengikuti acara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno, menjadi Gubernur Sumatera.

¹Sudharmono, dkk. (1985:24). *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*

²Sinar, dkk. (1997:141). *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*

Muhammad TWH³ menyatakan Teuku Moh. Hasan selaku Gubernur Sumatera mengambil berbagai keputusan atas nama Pemerintahan Pusat. Di antara ketetapan itu adalah peraturan pelaksanaan Pemerintahan untuk Gubernur-Gubernur Muda di Sumatera. Lebih lanjut diungkapkan oleh Mansur⁴ dalam bukunya *The Golden Bridge* bahwa dalam sidangnya yang pertama tanggal 17 – 19 April 1946 di Bukittinggi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan nama Dewan Perwakilan Sumatera memutuskan dibaginya Propinsi Sumatera secara administratif dalam 3 Sub Propinsi yaitu : a. Sub Propinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli, b. Sub Propinsi Sumatera Tengah meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, dan c. Sub Propinsi Sumatera Selatan meliputi Keresidenan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung dan Palembang.

Kemudian ditambahkan lagi oleh Muhammad TWH⁵ yaitu setelah Mr. Teuku Moehammad Hasan mengambil kebijakan untuk membagi Propinsi Sumatera menjadi tiga Propinsi, dia pun mengambil keputusan untuk mengangkat Mr. Sutan Muhammad Amin menjadi Gubernur Muda di Propinsi Sumatera Utara dimana sebelumnya Mr. S.M. Amin adalah Kepala Hakim Keresidenan Aceh juga Wakil Ketua Dewan Umum Perwakilan Keresidenan Aceh. Menurut penjelasan Mr. S.M. Amin⁶ memperoleh *Diploma Faculteit der Rechtsgeleerdheid* yang dengan Diploma ini Mr. S.M. Amin berhak memakai gelar *Meester in de Rechten*

³Muhammad TWH. (2007:16). *Bunga Rampai Perjuangan Rakyat Sumatera Utara*

⁴Mansur. (_____:44.) *The Golden Bridge (Jembatan emas)*

⁵Muhammad TWH. (2008:57). *Gubernur Pertama Dan DPR Sumatera Utara Pertama*

⁶Amin. (1984:67). *Perjalanan Hidupku Selama 10 Windu*

(Mr.) di muka namanya sebagai lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtschoogeschool*) di Batavia.

Pada saat sidang keputusan pembagian 3 propinsi di Bukittinggi itu (1946), Medan diduduki Sekutu. Agresi Militer Belanda yang membonceng pasukan Sekutu dilancarkan dan berbagai tempat di Sumatera Utara. Terjadi perlawanan dari berbagai kekuatan gerilya yang berlangsung cukup lama. Sementara kesultanan-kesultanan sebagai penguasa tradisional yang ada di Sumatera Utara tidak memberi respon terhadap kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan kompleksnya keadaan untuk bisa menjalankan suatu Pemerintahan sipil pada awal kemerdekaan.

Bagaimana pada masa yang rumit dan keras ini Pemerintahan sipil bisa dipertahankan dan berjalan? Apa yang dilakukan Gubernur Sumatera setelah membagi 3 propinsi kawasan ini serta bagaimana proses terbentuknya propinsi Sumatera Utara? Apa yang dilakukan Mr.SM.Amin setelah dilantik menjadi Gubernur Muda propinsi Sumatera Utara untuk mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan tajuk "*PERJUANGAN MR.SM. AMIN DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI PROPINSI SUMATERA UTARA 1945-1949*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Pemerintahan Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
2. Berbagai usaha diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melawan Belanda.
3. Terbentuknya Pemerintahan Indonesia di Propinsi Sumatera Utara pada awal kemerdekaan (1945 – 1949).
4. Terdapat peran strategis Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur pertama Sumatera Utara yang menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia dari kedudukan Belanda.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi di atas, maka masalah penelitian ini akan dibatasi pada:

1. Kondisi Propinsi Sumatera Utara pada masa transisi dari kekuasaan Jepang dan awal kemerdekaan.
2. Proses terbentuknya Pemerintahan Indonesia di Propinsi Sumatera Utara pada awal kemerdekaan (1945-1949).
3. Perjuangan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur pertama Sumatera Utara untuk menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi dan pendudukan Belanda (1945-1949).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi Propinsi Sumatera Utara pada masa transisi dari kekuasaan Jepang dan awal kemerdekaan?

2. Bagaimana proses terbentuknya Pemerintahan Indonesia di Propinsi Sumatera Utara pada awal kemerdekaan (1945-1949)?
3. Bagaimana perjuangan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur pertama Sumatera Utara untuk menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi dan pendudukan Belanda (1945-1949)?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan kondisi Propinsi Sumatera Utara pada masa awal kemerdekaan.
2. Untuk menjelaskan proses terbentuknya Pemerintahan Indonesia di Propinsi Sumatera Utara pada awal kemerdekaan (1945 – 1949).
3. Untuk menjelaskan perjuangan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur pertama Sumatera Utara dalam menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi dan pendudukan Belanda (1947-1949).

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai proses terbentuknya kepemimpinan Pemerintahan sipil di Propinsi Sumatera pada awal kemerdekaan.
2. Memperluas wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca untuk mengenang jasa Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur pertama Propinsi Sumatera Utara (1947 – 1949) yang terlupakan.

3. Memberikan informasi kepada pembaca peran strategis Mr. S.M. Amin dalam menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia melalui Propinsi Sumatera Utara dari pendudukan Belanda
4. Menambah sumber kajian mahasiswa Pendidikan Sejarah tentang Sejarah Lokal dalam cakupan Sejarah Nasional.
5. Menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk menjadikan Mr. S.M. Amin sebagai pahlawan nasional.
6. Menjadi bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan membahas mengenai permasalahan yang sama.
7. Memberi wawasan kepada peneliti tentang penulisan sebuah karya tulis ilmiah.